

## **Stabilitas Ekonomi Makro Indonesia Menghadapi Resesi Global Akibat Perang Rusia-Ukraina Pada Tahun 2022**

Muhammad Ar-RaafiCaesar Wijaya<sup>1</sup>, Muhammad Iqbal<sup>2</sup>, Fuat Albayumi<sup>3</sup>  
*190910101070@mail.unej.ac.id*

### **Abstract**

*Indonesia is a country whose economy is quite stable in the midst of a global recession. Indonesia recorded economic growth amidst the pressure of a global recession due to the Russia-Ukraine war in 2022, while countries with strong economies such as the United States actually experienced a recession. This research aims to discuss why the Indonesian economy remains stable amidst the global recession due to the Russian-Ukrainian war in 2022. The research method used in this research is a qualitative method with secondary data. Data validation in this research used the data source triangulation method with qualitative descriptive analysis. Based on the application of macroeconomic theory, the results of this research are that the Indonesian economy is stable against the global recession. Indonesia's strategy for maintaining its economy is by implementing expansionary fiscal policy, controlling interest rates through monetary policy, and supply side policies in the form of adjusting income tax rates, business support through capital loan interest rate subsidies, deregulation or cutting inefficient regulations.*

**Keywords:** *Indonesia, macro economics, recession, Russia-Ukraine*

### **Abstrak**

Indonesia merupakan negara yang perekonomiannya cukup stabil di tengah resesi global. Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan resesi global akibat perang Rusia-Ukraina pada tahun 2022, sedangkan negara dengan perekonomian kuat seperti Amerika Serikat justru mengalami resesi. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengapa perekonomian Indonesia tetap stabil di tengah resesi global akibat perang Rusia-Ukraina pada tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan data sekunder. Validasi data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber data dengan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan penerapan teori makro ekonomi, hasil dari penelitian ini yaitu perekonomian Indonesia stabil terhadap resesi global. Strategi Indonesia dalam menjaga perekonomiannya yaitu dengan menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, control suku bunga melalui kebijakan moneter, dan kebijakan sisi penawaran berupa penyesuaian tarif pajak penghasilan, dukungan usaha melalui subsidi suku bunga pinjaman modal, deregulasi atau pemangkasan regulasi yang tidak efisien.

**Kata Kunci:** *Indonesia, ekonomi makro, resesi, Rusia-Ukraina*

---

<sup>1,2,3</sup> Universitas Jember

## 1. Pendahuluan

Resesi global merupakan suatu kondisi dimana hubungan perdagangan dan sistem keuangan internasional mengalami kemerosotan. Kemudian perekonomian nasional di berbagai negara mengalami guncangan yang pada akhirnya menyebabkan negara tersebut masuk ke dalam jurang resesi. Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara harus mengalami penurunan selama dua kuartal berturut-turut agar dapat diklasifikasikan sebagai resesi (Kose et al., 2020). Kemudian menurut *The International Monetary Fund* (IMF), ciri-ciri resesi global yaitu ketika terjadi penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) di seluruh dunia. IMF mendefinisikan resesi global sebagai penurunan output global yang diiringi dengan melemahnya indikator-indikator ekonomi makro, yaitu seperti perdagangan, arus modal, dan lapangan kerja (Kamalina, 2023).

Perang Rusia-Ukraina memberikan konsekuensi yang serius pada perekonomian global. Pasar modal bereaksi cepat dan mengalami penurunan tajam ketika berita tentang invasi Rusia ke Ukraina mencuat. Kemudian disusul oleh naiknya harga minyak global hingga \$100 per barel, sementara pada wilayah Eropa harga gas alam mengalami kenaikan hingga 70% (Amani, 2022). Kenaikan harga energi global akan berdampak negatif pada perekonomian global. Negara-negara pengimpor minyak adalah negara yang paling dirugikan atas naiknya harga energi global. Harga yang melambung tinggi akan berdampak pada daya beli konsumen dan berkontribusi terhadap kenaikan inflasi di seluruh dunia (Cifuentes-Faura, 2022).

Perang Rusia-Ukraina berdampak negatif pada perputaran ekonomi dan meningkatkan ketidakpastian global. Apabila hal tersebut berlangsung dalam jangka panjang, maka perekonomian global bisa mengalami kerusakan yang cukup besar. Terlebih Rusia merupakan pemasok komoditas utama bagi Uni Eropa, seperti minyak mentah dan gas alam. Oleh karena itu, Eropa sangat bergantung pada Rusia. Kemudian bagi Amerika Serikat, perang Rusia-Ukraina berdampak pada terganggunya rantai pasokan energi sehingga mengakibatkan lonjakan inflasi pada negaranya. Selain berdampak pada negara lain, tentu saja perang tersebut juga berdampak pada negara yang sedang terlibat, yaitu Rusia dan Ukraina. Ketika Rusia melancarkan invasi dan berperang terhadap Ukraina, maka Rusia dihadapkan oleh serangkaian sanksi ekonomi dari negara barat. Ukraina juga mengalami kelumpuhan ekonomi karena serangan yang dilancarkan oleh Rusia (Amani, 2022).

Rusia dan Ukraina merupakan salah satu pemasok hasil agrikultur dunia dengan total total produksi 29% gandum, 19% jagung, dan 78% minyak bunga matahari dari kebutuhan global (Dianne, 2023). Selain itu, menurut *Centre of Indonesian Policy Studies* (CIPS) salah satu komoditas ekspor utama Rusia yaitu minyak bumi, gas alam, dan barang tambang dunia. Konflik geopolitik yang sedang terjadi dapat menghambat proses perdagangan dengan kedua negara tersebut. Selain menurunnya jumlah produksi, blokade pelabuhan Ukraina juga menjadi salah satu faktor yang mengganggu proses ekspor impor negara tersebut. Terutama pemblokiran pelabuhan di wilayah pantai selatan Ukraina, termasuk pelabuhan utama Odesa di Laut Hitam. Oleh karena itu, dengan adanya perang Rusia-Ukraina tersebut tentu saja menjadi permasalahan global yang cukup serius karena mengganggu *supply chain energy* global.

Ketidakpastian pasar internasional mengakibatkan tsunami inflasi yang sangat tinggi di Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa. Bahkan inflasi yang terjadi di Amerika Serikat menyentuh rekor tertingginya sejak 1981. Indeks harga

konsumen (CPI) AS naik 9,1%. Hal tersebut mendorong Bank Sentral AS *The Federal Reserve* (The Fed) mengambil kebijakan yang cukup ekstrem dalam menaikkan suku bunga guna mengontrol laju inflasi. Di mana ketika suku bunga naik maka laju ekonomi akan sedikit melambat kemudian mempunyai efek ke spending masyarakat melemah, sehingga inflasi menurun dan *Gross Domestic Product* (GDP) pun juga ikut turun. GDP Amerika Serikat mengalami penurunan pada dua kuartal berturut-turut, yaitu pada kuartal I-2022 sebesar -1,6% dan kuartal II-2022 sebesar -0,9%, sehingga Amerika Serikat secara teknis telah mengalami resesi (Investing, 2023).

Ketidakstabilan perekonomian telah terjadi pada sebagian besar negara-negara di dunia. Seperti Uni Eropa yang mengalami krisis energi akibat terputusnya supply-chain energi karena perang Rusia-Ukraina, sehingga banyak negara di kawasan Uni Eropa mengalami lonjakan inflasi yang tinggi bahkan masuk ke dalam jurang resesi. Kemudian Amerika Serikat juga mengalami resesi sehingga memaksa The Fed untuk menaikkan suku bunga yang tinggi karena angka inflasinya mencapai angka 9,1% pada Juni 2022 (Putri, 2022). Inggris juga mengalami hal yang sama, perekonomian negaranya mengalami guncangan ekonomi yang luar biasa akibat perang Rusia-Ukraina pada tahun 2022. Angka inflasi di Inggris bahkan mencapai lebih dari 10% sehingga bank sentral Inggris terpaksa untuk menaikkan suku bunganya juga untuk menahan laju inflasi. Hal tersebut menyeret Inggris ke dalam jurang resesi (Suhendra, 2022).

Indonesia merupakan negara yang perekonomiannya cukup stabil di tengah bayang-bayang dan ancaman resesi global tersebut. Inflasi yang dialami oleh Indonesia hanya sebesar 4,94% *year on year* pada bulan Juli 2022 (Santosa, 2017). Tingkat inflasi tersebut masih dalam batas aman saat dunia berada dalam tekanan inflasi yang tinggi (CORE, 2022). Selain itu *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia justru bertumbuh sebesar 5,44% pada kuartal II-2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2022 mencatatkan pertumbuhan yang impresif sebesar 5,31 persen (Kemenko Perekonomian, 2023). Kemudian tingkat pengangguran terbuka di Indonesia per Agustus 2022 sebesar 5,86 persen (CNN, 2023). Neraca pembayaran secara keseluruhan pada tahun 2022 juga mencatatkan surplus sebesar US\$ 4 miliar, dengan cadangan devisa pada akhir Desember 2022 sebesar US\$ 137,2 miliar serta berada di atas standar kecukupan internasional (Detik, 2023).

Hal tersebut menarik untuk dibahas karena negara dengan ekonomi yang kuat seperti Amerika dapat mengalami resesi, namun negara berkembang seperti Indonesia justru mencatatkan pertumbuhan ekonomi terhadap tekanan resesi global akibat perang Rusia-Ukraina pada tahun 2022. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini membahas “Bagaimana strategi Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi makro terhadap resesi global akibat perang Rusia-Ukraina pada tahun 2022?”

Kerangka teori merupakan bagian penelitian yang memberikan definisi dari suatu konsep ataupun variabel (Siyoto dan Sodik, 2015). Penyajian definisi ini berguna untuk memfokuskan dan memberikan batasan terhadap teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan (Djamba & Neuman, 2002). Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka teori ekonomi makro akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

## **Teori Ekonomi Makro**

Dalam hubungan internasional, ada banyak teori yang bisa dipakai untuk menentukan perspektif suatu fenomena. Salah satu teori tersebut adalah teori ekonomi makro. David Romer mengatakan bahwa ekonomi makro merupakan sebuah studi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan (Romer D, 1996). Teori ini lebih berfokus kepada pertanyaan-pertanyaan paling penting dalam perekonomian. Seperti mengapa ada negara kaya dan negara miskin? Mengapa suatu negara dapat berkembang? Apa saja penyebab resesi dan pertumbuhan ekonomi? Mengapa ada pengangguran dan apa yang menyebabkan pengangguran meningkat? Mengapa terjadi inflasi dan apa saja sumber inflasi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pokok bahasan makro ekonomi.

Relevansi teori ekonomi makro dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana strategi Indonesia untuk tetap stabil di tengah gejolak ekonomi internasional. Perang yang telah terjadi antara Rusia-Ukraina berpengaruh terhadap perekonomian internasional (Bakrie, Delanova, & Yani, 2022). Oleh karena itu, strategi yang digunakan Indonesia memiliki kaitan dengan faktor intermestik akibat adanya perang tersebut.

## **Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diatur oleh pemerintah, biasanya berada pada kewenangan DPR dan diprakarsai oleh lembaga eksekutif pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal yaitu tarif atau pajak dan pengeluaran pemerintah. Gagasan Keynes cenderung menginginkan adanya intervensi dari pemerintah untuk menggunakan pengeluaran pemerintah dan pajak sebagai perangkat kebijakan stabilitas (Wepo, 2023). Kebijakan fiskal mencakup serangkaian langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur tingkat aktivitas ekonomi melalui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran publik.

Hal-hal yang merupakan elemen utama dari kebijakan fiskal yaitu pajak dan tarif pajak, penerimaan negara, anggaran dan pengeluaran pemerintah, dan stimulus ekonomi (Prasetyia, n.d.). Pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk mengatur penerimaan fiskal dan mempengaruhi perilaku ekonomi, kemudian penyesuaian tarif pajak dapat digunakan untuk merangsang investasi, meningkatkan konsumsi, atau mengatasi ketidakseimbangan ekonomi. Anggaran dan pengeluaran pemerintah digunakan untuk mengatur alokasi dana untuk membantu mencapai tujuan ekonomi. Kemudian stimulus ekonomi berguna pada waktu ekonomi mengalami perlambatan atau resesi. Kredit dan insentif berguna untuk diberikan kepada sektor-sektor tertentu atau individu yang terlibat dalam kegiatan yang dianggap bermanfaat bagi perekonomian (Maura, 2023).

## **Kebijakan Moneter**

Kebijakan moneter diatur oleh Bank Sentral, dalam hal ini adalah Bank Indonesia untuk mengatur instrumen kebijakan moneter. Misalnya seperti perubahan stok uang beredar (penawaran uang) dan perubahan suku bunga dalam rangka untuk memengaruhi pengeluaran agregat. Gagasan dari kaum monetaris yaitu jumlah uang beredar (penawaran uang) merupakan determinan pokok dari tingkat harga dan kegiatan ekonomi.

Kebijakan moneter adalah seperangkat instrumen yang digunakan oleh bank

sentral suatu negara untuk mengatur dan mengendalikan pasokan uang, suku bunga, dan kondisi moneter secara umum. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal-hal yang merupakan elemen utama dari kebijakan moneter yaitu suku bunga, operasi pasar terbuka, kredit dan fasilitas pembiayaan, dan kontrol inflasi (Kuncoro, 2021). Suku bunga merupakan instrumen utama dalam kebijakan moneter. Bank sentral dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mengendalikan aktivitas ekonomi. Suku bunga yang lebih tinggi dapat digunakan untuk meredam inflasi dan mendorong tabungan, sementara suku bunga yang lebih rendah merangsang pinjaman dan investasi. Salah satu tujuan utama kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi. Bank sentral menggunakan berbagai instrumen untuk memonitor dan meredam tekanan inflasi, yaitu seperti mengatur tingkat suku bunga (OCBC, 2021)

### **Kebijakan Sisi Penawaran**

Kebijakan sisi penawaran mengacu pada serangkaian langkah dan kebijakan ekonomi yang ditujukan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan kapasitas produksi suatu negara. Berbeda dengan kebijakan sisi permintaan yang lebih menekankan pada stimulasi konsumsi dan pengeluaran, kebijakan sisi penawaran bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dalam menciptakan barang dan jasa. Kebijakan sisi penawaran memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan perusahaan, sehingga produk yang ditawarkan bisa memiliki harga yang murah dan memiliki kualitas yang lebih baik. Kebijakan sisi penawaran pada dasarnya berusaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas faktor produksi. Upaya kebijakan sisi penawaran yang dapat diterapkan yaitu dengan pendidikan dan pelatihan, dukungan usaha, infrastruktur, reformasi regulasi dan birokrasi, dan insentif pajak (Nasrudin A, 2022).

## **2. Metodologi**

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi literatur atau juga biasa dikenal dengan istilah studi literatur (*literature study*). Studi literatur merupakan bentuk dari pengumpulan data sekunder yang artinya data yang didapat bukanlah hasil dari pengamatan langsung, melainkan berasal dari pengamatan pihak lain. Dalam mengumpulkan data, penulis menghimpun data yang diperlukan melalui Buku Elektronik (*E-book*), Jurnal, *Report*, Berita (*online*), Laman resmi pemerintah, NGO, dan laman-laman ilmiah.

Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yang artinya teknik ini berupaya untuk menjelaskan, menginterpretasikan dan menggambarkan suatu peristiwa yang menjadi konteks pembahasan.

## **3. Hasil dan Diskusi**

### **Strategi Indonesia Menghadapi Resesi Global Akibat Perang Rusia-Ukraina Pada Tahun 2022**

Stabilitas ekonomi makro selalu menjadi tujuan utama bagi suatu negara. Karena ketidakstabilan perekonomian suatu negara akan menimbulkan berbagai masalah ekonomi, seperti kontraksi pertumbuhan ekonomi, kemudian angka

pengangguran dan inflasi yang tinggi. Stabilitas perekonomian akan tercapai apabila indikator-indikator dalam ekonomi makro tetap terjaga. Indikator-indikator tersebut antara lain adalah tingkat suku bunga, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi (Aqwaanaserdaulay et al, 2023). Oleh karena itu, dalam menjaga kestabilan perekonomian suatu negara dibutuhkan peran pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang tepat untuk ekonomi makro negaranya.

Indonesia sebagai negara berkembang juga dihadapkan pada berbagai tekanan ekonomi global yang tidak stabil. Namun ditengah keadaan dunia yang sedang tidak stabil tersebut, Indonesia justru mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44% pada kuartal II-2022. Serangkaian data ekonomi yang telah dirilis pada akhir tahun 2022 menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia cukup bagus dan jauh dari kata resesi. Indonesia juga mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada kuartal III-2022. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa PDB Indonesia mengalami kenaikan sebesar 5,72% pada kuartal III-2022. Angka tersebut telah melampaui proyeksi pemerintah yaitu sebesar 5,7% dan proyeksi Bank Indonesia (BI) yaitu sebesar 5,5% (BPS, 2023).

Perekonomian tidak stabil secara inheren, sehingga perekonomian sering kali mengalami guncangan pada penawaran dan permintaan secara agregat, kecuali para pembuat kebijakan menggunakan kebijakan moneter dan fiskal untuk menstabilkan perekonomian (Michael, 2008). Kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam menghadapi berbagai permasalahan ekonomi makro yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan sisi penawaran (Sukirno, 2017). Oleh karena itu, Indonesia menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut untuk menjaga stabilitas perekonomiannya.

### **Kebijakan Fiskal Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro Indonesia**

APBN adalah salah satu alat kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu APBN berperan penting dan memiliki efektivitas yang strategis dalam mempengaruhi perekonomian untuk mewujudkan target pembangunan nasional, dalam hal ini yaitu kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Pengelolaan APBN yang baik didukung oleh penerimaan negara yang tumbuh tinggi. Pada semester I tahun 2022, kinerja pendapatan negara cukup kuat. Indonesia memiliki kinerja pertumbuhan pendapatan negara paling tinggi apabila dibandingkan dengan negara lainnya terutama negara kawasan Asia Tenggara dan India. Hal tersebut mencerminkan bahwa terdapat peembangan yang positif bagi pemulihan ekonomi nasional sehingga membawa dampak yang positif bagi kinerja pendapatan negara Indonesia yang tumbuh tinggi. Oleh karena itu, APBN 2022 memiliki pondasi yang kuat bagi konsolidasi fiskal negara (BKF, 2022).

Prioritas utama kebijakan fiskal pada tahun 2022 yaitu dengan memaksimalkan peran APBN sebagai *shock absorber*<sup>2</sup>. Perang Rusia-Ukraina telah mengakibatkan guncangan global sehingga ketidakpastian ekonomi global meningkat. Oleh karena itu, peran APBN berfungsi untuk meredam guncangan tersebut melalui alokasi subsidi dan kompensasi yang lebih tinggi. Selain itu APBN juga berperan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui perlindungan sosial terutama pada kelompok rentan dan miskin (Antara, 2023). Menurut Kemenko

---

<sup>2</sup>*Shock absorber* artinya menyerap berbagai *shock* yang diakibatkan oleh guncangan global.

Perekonomian Republik Indonesia, kunci dari ekonomi Indonesia adalah konsumsi masyarakat, karena merupakan kontributor utama dari Produk Domestik Bruto (PDB). Maka dari itu, menjadi penting bagi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat melalui stimulus, subsidi, dan kompensasi agar dapat menopang konsumsi masyarakat.

Konsekuensi dari penjagaan daya beli masyarakat melalui subsidi dan kompensasi yaitu pembengkakan belanja negara yang meningkat hingga tiga kali lipat. Dalam hal ini APBN 2022 yang awalnya Rp152,5 triliun menjadi Rp502, triliun. Alokasi subsidi tersebut digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga perekonomian dapat terus berputar. APBN telah bekerja keras untuk menjaga stabilitas harga sehingga inflasi sampai akhir 2022 dapat terjaga pada level 5,5% (Kemenkeu, 2022). Menurut Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, terdapat kemungkinan bahwa subsidi masih terus membengkak hingga di atas Rp690 triliun. Oleh karena itu, pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pada 3 September 2022 (Rachman A, 2023). Kemudian untuk menjaga daya beli masyarakat yang menurun akibat naiknya harga BBM, pemerintah memberikan Bantuan Tunai Langsung (BLT) dan Bantuan Sosial (Bansos) sehingga dapat menekan resiko krisis ekonomi di masyarakat. Dengan demikian perekonomian dapat terus berputar dan bertumbuh.

Indonesia pada tahun 2022 menikmati *commodity boom* sehingga pendapatan negara meningkat sangat kuat (Supriyatna, 2022). *Commodity boom* merupakan kenaikan harga komoditas dalam suatu periode tertentu. Hal tersebut biasanya terjadi ketika dunia sedang mengalami krisis ekonomi atau resesi. Oleh karena itu, semua harga komoditas mengalami kenaikan mulai dari minyak, gas, tambang, hingga hasil pertanian. Dengan demikian, Indonesia sebagai salah satu negara eksportir komoditas terbesar di dunia memperoleh keuntungan dari adanya kenaikan harga komoditas tersebut. Keuntungan berupa surplus neraca perdagangan yang tinggi menjadi salah satu pendorong perekonomian dalam negeri (Gian, 2021).

Kebijakan fiskal sebagai stabilisasi ekonomi makro pada tahun 2022 memiliki kinerja yang positif terhadap perekonomian. Hal tersebut dapat tercermin pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dengan kegiatan ekonomi yang terus meningkat (Nazara, 2022). Perekonomian Indonesia masih tetap memberikan optimisme ditengah bayang-bayang ketidakpastian global. Komitmen pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif harus terus diterapkan sehingga dapat menopang dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

### **Kebijakan Moneter Sebagai Kontrol Inflasi**

Pada ekonomi makro, kebijakan moneter merupakan kebijakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter juga merupakan alat bagi sebuah negara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu misalnya untuk menahan laju inflasi. Pada dasarnya kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur keseimbangan internal dan eksternal. Keseimbangan internal yaitu yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan. Sedangkan keseimbangan eksternal yaitu meliputi keseimbangan neraca pembayaran. Oleh karena itu, apabila suatu perekonomian sedang mengalami gangguan maka kebijakan moneter dapat digunakan sebagai alat stabilisasi untuk memulihkan perekonomian (Latumaerissa, 2020).

Kebijakan moneter merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Bank Sentral untuk mempengaruhi perekonomian dengan cara mengatur

keseimbangan antara jumlah uang yang beredar dan penawaran barang sehingga inflasi dapat terkontrol. Kemudian kebijakan moneter juga merupakan tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter untuk mengatur suku bunga dan jumlah uang yang beredar dalam rangka untuk mempengaruhi permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi (Sudirman, 2017).

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, kebijakan moneter Bank Indonesia memiliki tujuan utama untuk menjaga stabilitas nilai Rupiah, kemudian menjaga stabilitas sistem pembayaran serta stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas nilai Rupiah disini artinya yaitu kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar Rupiah. Indikator dari kestabilan harga barang dan jasa yaitu inflasi yang rendah dan stabil. Sedangkan indikator kestabilan nilai tukar Rupiah yaitu dilihat dari kurs terhadap mata uang negara lain. Hal tersebut penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (BI, 2023).

Upaya dalam mencapai tujuan tersebut dituangkan dalam kerangka kebijakan moneter Bank Indonesia yang disebut *Inflation Targeting Framework* (ITF) sejak 1 Juli 2005. Sasaran utama (*overriding objective*) pada kerangka tersebut yaitu inflasi. Bank Indonesia terus memperkuat efektivitas kebijakan moneternya untuk mengontrol laju inflasi. Hal tersebut berguna untuk menghadapi dinamika dan tantangan perekonomian yang terus berubah. Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai Lembaga yang mengatur kebijakan moneter di Indonesia memiliki peran yang penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro Indonesia (BI, 2023).

Pada perekonomian yang relatif rentan, kebijakan moneter ketat diharapkan mampu untuk mengontrol laju inflasi agar tidak terlampaui tinggi. Namun inflasi pada tahun 2022 agak sedikit berbeda karena sebagian besar inflasi dipicu oleh masalah geopolitik dan geoekonomi. Keterbatasan bahan baku yang merupakan akibat dari terganggunya *supply chain* global mengakibatkan krisis pangan dan krisis energi di banyak negara. Perekonomian global yang belum pulih akibat pandemi COVID-19 diperburuk oleh perang Rusia-Ukraina dan ketegangan antara Rusia dan NATO menyebabkan laju inflasi yang tinggi pada banyak negara. Oleh karena itu, kompleksitas masalah inflasi tersebut membuat penerapan kebijakan moneter ketat di berbagai negara semakin rumit. Berbagai negara di dunia sedang mengalami permasalahan ekonomi yang berat sehingga mungkin saja memerlukan pelonggaran moneter. Oleh karena itu, pengetatan moneter di tengah situasi yang memerlukan pelonggaran moneter merupakan pilihan yang sangat sulit bagi sebagian negara di dunia karena berpotensi menimbulkan resesi apabila tidak diatur dengan hati-hati (Gouw, 2022).

Bank Indonesia merespon berbagai tekanan global tersebut dengan membuat kebijakan moneter yang diprioritaskan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari prioritas kebijakan tersebut yaitu untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Prioritas kebijakan Bank Indonesia yaitu menaikkan suku bunga secara bertahap agar perekonomian tetap stabil. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengatur suku bunga merupakan upaya konkrit dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan mengontrol inflasi barang impor.

Perekonomian makro Indonesia relatif cukup baik ditinjau dari data-data yang telah dirilis. Hal tersebut dapat tercermin pada indikator-indikator seperti pertumbuhan ekonomi pada kuartal tiga 2022 yang berada di angka 5,7%. Kemudian



inflasi pada bulan November masih di bawah 6%, tepatnya pada angka 5,42%. Kemudian neraca pembayaran Indonesia juga mengalami surplus pada kuartal tiga 2022. Cadangan devisa negara pada bulan November 2022 juga mencatatkan angka yang cukup stabil yaitu pada kisaran USD 134 miliar. Indikator makro ekonomi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia cukup stabil pada tahun 2022 (Warjiyoet al., 2022).

### **Kebijakan Sisi Penawaran Sebagai Stimulus Produktif Masyarakat**

Kebijakan sisi penawaran (*supply side policy*) merupakan suatu kebijakan ekonomi yang berfokus pada sisi penawaran agregat. Seperti peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kapasitas potensial dari sebuah perekonomian. Kebijakan sisi penawaran memiliki fokus terhadap dua hal, yaitu upaya dalam meningkatkan semangat para pekerja untuk bekerja dan meningkatkan efisiensi produksi suatu bisnis atau usaha. Pada dasarnya, kebijakan sisi penawaran merupakan kebijakan yang memiliki prioritas untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas faktor produksi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendukung kemajuan teknologi (Nasrudin, 2022).

Kebijakan sisi penawaran merupakan konsep makroekonomi yang memiliki pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkat apabila pasokan barang dan jasa mengalami peningkatan juga. Upaya dalam meningkatkan pasokan barang dan jasa tersebut dapat dilakukan melalui penerapan kebijakan-kebijakan ekonomi seperti mengurangi tarif pajak penghasilan, subsidi suku bunga pinjaman modal, dan deregulasi. Pengurangan tarif pajak penghasilan dapat memberikan pelaku bisnis atau usaha lebih banyak uang tunai untuk diinvestasikan kembali. Penurunan suku bunga pinjaman modal dapat memberikan insentif kepada pelaku bisnis untuk berinovasi dan dapat merealisasikan inovasinya. Kemudian deregulasi digunakan untuk menghilangkan hambatan produksi yang seringkali terjadi seperti urusan birokrasi dan persyaratan-persyaratan lainnya. Oleh karena itu, ketiga variabel tersebut secara komprehensif dapat meningkatkan perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Chen, 2023).

Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, pemerintah telah merancang kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi melalui pendekatan sisi penawaran. Kebijakan ini dapat memberikan dorongan positif terhadap sektor-sektor penting dalam perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan memitigasi risiko inflasi. Pilar utama kebijakan sisi penawaran yang diterapkan oleh Indonesia yaitu penyesuaian tarif pajak penghasilan, kemudian dukungan usaha melalui subsidi suku bunga pinjaman modal bagi UMKM, dan pemangkasan regulasi yang tidak efisien atau deregulasi.

Reformasi perpajakan dilakukan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di bidang perpajakan. Reformasi tersebut dilakukan guna menciptakan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel. Reformasi perpajakan dapat memperkuat basis pajak sehingga meningkatkan penerimaan pajak yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan negara. Berdasarkan tarif lama sesuai UU PPh No. 36 Tahun 2008, lapisan pajak Indonesia hanya memiliki 4 lapisan (Anggreni, 2022).

Jumlah lapisan pajak orang pribadi di Indonesia termasuk sedikit apabila dibandingkan dengan negara lain. Contohnya seperti negara Filipina dan Vietnam yang memiliki 7 lapisan pajak, sedangkan Indonesia hanya memiliki 4 lapisan pajak.

Dengan demikian, PPh orang pribadi di Indonesia kurang progresif. Oleh karena itu, perlu adanya kenaikan tarif dan penambahan lapisan baru agar pemajakan orang kaya lebih maksimal.

Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tahun 2021 terdapat *bracket* atau lapisan baru untuk pajak penghasilan (PPh) sehingga memiliki lima lapisan. Lapisan baru tersebut yaitu mereka yang memiliki penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun akan dikenakan PPh sebesar 35% dari sebelumnya yang hanya 30% bagi orang kaya (Lathifa, 2023).

Naiknya lapisan tarif pada PPh orang pribadi tersebut merupakan sebagai bentuk konkrit upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat menengah kebawah atau pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut dapat terjadi karena pada lapisan terbawah yang sebelumnya hanya mencapai Rp50 juta, kemudian mengalami kenaikan menjadi Rp60 juta dan dikenakan tarif yang masih sama yaitu 5% (Tommy, 2022). Hal tersebut sesuai dengan prinsip *ability to pay* dan gotong royong, sehingga masyarakat yang berpenghasilan kecil terlindungi dan masyarakat yang berpenghasilan tinggi dipajaki lebih tinggi.

Dampak dari adanya perubahan tarif progresif PPh Orang Pribadi pada UU HPP tahun 2021 yaitu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pegawai yang berpenghasilan rendah memiliki pajak terutang yang lebih kecil setiap bulannya. Perubahan tarif progresif dalam UU HPP tahun 2021 tersebut juga menambah progresivitas dalam pengenaan PPh Orang Pribadi dengan adanya 1 lapisan baru teratas. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan asas keadilan dan keberpihakan pada golongan wajib pajak yang berpenghasilan rendah. Perubahan kebijakan tersebut dapat mendorong *redistribution of income*<sup>3</sup> yang lebih adil dan merata (Arianty, 2022). Dengan demikian, masalah ketimpangan yang menyebabkan terganggunya stabilitas dan keseimbangan ekonomi secara keseluruhan dapat dikurangi (Verianty, 2023).

Penyaluran pinjaman kepada masyarakat merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam upaya penurunan suku bunga pinjaman modal, pemerintah memberikan subsidi bunga melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan, sehingga masyarakat dapat mengakses kredit dengan mudah dan murah.

UMKM memiliki peran vital dalam menjaga pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja. Hal tersebut dapat terjadi karena jumlah UMKM di Indonesia mencapai 98% dari total perusahaan, sehingga UMKM mampu memberikan kontribusi signifikan sebesar 57% terhadap PDB dan menyerap sekitar 60% tenaga kerja (Kemenko Perekonomian, 2022). Meskipun demikian, UMKM sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan informasi dan akses terhadap sumber kredit atau pembiayaan sehingga menghambat potensi pertumbuhan dan peluang investasi mereka. Oleh karena itu, pada tahun 2022 disepakati perubahan subsidi program KUR. Terdapat dua jenis subsidi KUR yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu KUR mikro dengan bunga 6% dan KUR super mikro dengan bunga 3%. Apabila tidak disubsidi, maka bunga yang berlaku bisa mencapai 16%

---

<sup>3</sup>*Redistribution of income* mengacu pada kebijakan yang digunakan untuk mengubah pola distribusi pendapatan pada suatu masyarakat. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan atau ketimpangan pendapatan antar individu pada suatu negara atau wilayah (Bourguignon, 2018).

(Rachman, 2022).

Dengan demikian, program tersebut mampu memperkokoh kemampuan permodalan usaha dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Perluasan akses KUR tersebut merupakan motor pengembangan UMKM sehingga dapat memperkuat pasar domestik dan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri. Dengan demikian, kebijakan subsidi KUR dapat menjadi akselerasi dalam penciptaan usaha baru sehingga laju pertumbuhan ekonomi dapat terus terjaga. (Moegiarso, 2023).

Deregulasi merupakan salah satu kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan investasi dan mendorong perekonomian nasional. Kebijakan ini biasanya diterapkan ketika suatu negara mengalami perlambatan ekonomi. Deregulasi memiliki peran untuk meniadakan berbagai perundang-undangan yang terbukti menghambat dan memperlambat aktivitas perekonomian. Misalnya seperti terlalu banyak jenis perijinan dari berbagai instansi pemerintahan untuk memberikan izin usaha. Banyaknya intervensi pemerintah dalam urusan birokrasi terkadang memakan waktu berbulan-bulan, sehingga hal tersebut dapat menghambat aktivitas ekonomi. Hal tersebut dapat berakibat pada kejenuhan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya deregulasi untuk menyederhanakan aturan, prosedur, dan birokrasi yang ada (Taufiqurrahman, 2022).

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kepastian hukum dan peran pemerintah agar memberikan kemudahan berinvestasi dan berbisnis. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Perppu tersebut mendorong aturan-aturan yang berkaitan dengan kemudahan, penguatan koperasi dan UMKM, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Dengan demikian, dinamika global yang dipicu oleh lonjakan harga energi dan pangan akibat gangguan rantai pasokan global, telah menyebabkan resesi global dan tingginya angka inflasi di berbagai negara. Situasi tersebut diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Untuk merespon tantangan tersebut, pemerintah telah mengimplementasikan bauran kebijakan yang diarahkan pada peningkatan daya saing dan penarikan investasi nasional. Langkah-langkah ini terwujud melalui transformasi ekonomi yang terkandung dalam Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja (Limanseto, 2021).

Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja merupakan Undang-Undang baru yang menyederhanakan regulasi dan memangkas pasal-pasal dari undang-undang sebelumnya termasuk pasal tentang ketenagakerjaan menjadi satu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ketika UU *Omnibus Law* Cipta Kerja diterapkan maka UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) tidak berlaku lagi. Secara substansi, UU Cipta Kerja tersebut terdiri atas 11 klaster peraturan dengan poin penting didalamnya, yaitu: 1) Penyederhanaan Perizinan Berusaha, 2) Persyaratan Investasi, 3) Ketenagakerjaan, 4) Kemudahan dan Perlindungan UMKM, 5) Fasilitas Fiskal, 6) Penataan Ruang, 7) Lahan dan Hak Atas Tanah, 8) Lingkungan Hidup, 9) Konstruksi dan Perumahan, 10) Kawasan Ekonomi, 11) Investasi dan Proyek Pemerintah (Kominfo, 2021).

Dengan menerapkan penyesuaian tarif pajak penghasilan, memberikan subsidi suku bunga pinjaman modal, dan pemangkasan regulasi yang tidak efisien atau deregulasi, maka pelaku usaha dan tenaga kerja dapat menghasilkan output yang

efisien. Dengan begitu produktivitas akan meningkat. Kemudian diiringi oleh permintaan yang terjaga karena kebijakan sisi permintaan (kebijakan fiskal dan kebijakan moneter) yang tepat, maka perekonomian akan tetap berjalan dan terus berputar meski di tengah situasi dan kondisi yang sulit sekalipun. Seperti krisis ekonomi akibat perang Rusia-Ukraina yang terjadi pada tahun 2022.

#### 4. Kesimpulan

Terdapat kontradiksi antara tren perekonomian global dan perekonomian nasional Indonesia. Ketika perekonomian global mencatatkan penurunan pertumbuhan ekonomi hingga terseret ke dalam resesi, Indonesia justru mencatatkan kinerja perekonomian yang positif.

Dalam implementasinya, pemerintah Indonesia menerapkan tiga kebijakan strategis dalam merespon ancaman resesi global. Kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan sisi penawaran merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengatur dan menjalankan perekonomian. Pada situasi ketidakstabilan perekonomian global, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan fiskal ekspansif sebagai alat stabilisasi ekonomi makro menggunakan APBN sebagai *shock absorber* melalui subsidi dan Bantuan Tunai Langsung (BLT) sehingga daya beli dapat terjaga. Hal tersebut juga didukung oleh *commodity boom* sehingga Indonesia diuntungkan dengan surplus neraca perdagangan yang tinggi. Oleh karena itu, perekonomian dapat terus bertumbuh. Kebijakan moneter melalui Bank Indonesia berperan dalam menjaga inflasi dengan mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara mengontrol tingkat suku bunga. Kemudian untuk menciptakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran, kebijakan sisi penawaran menerapkan penyesuaian tarif pajak penghasilan, dukungan usaha melalui subsidi suku bunga pinjaman modal bagi UMKM, dan pemangkasan regulasi yang tidak efisien atau deregulasi. Oleh karena itu, kebijakan sisi penawaran dapat menghasilkan *output* produksi yang efisien melalui para pelaku usaha dan tenaga kerja.

Dengan demikian, strategi kebijakan pemerintah Indonesia merupakan upaya yang dibuat karena adanya dorongan faktor intermestik dalam merespon ancaman resesi global. Strategi yang diterapkan oleh Indonesia merupakan solusi yang linear dalam merespon ancaman resesi global tersebut. Oleh karena itu, perekonomian Indonesia dapat terus bertumbuh di tengah ketidakstabilan perekonomian global akibat perang Rusia-Ukraina pada tahun 2022.

#### Daftar Pustaka

- Amani, N. 2022. Dampak Perang Rusia Ukraina Terhadap Ekonomi AS dan Eropa. Diakses dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4917973/dampak-perang-rusia-ukraina-terhadap-ekonomi-as-dan-eropa?page=2> pada 27 Juni 2023.
- Anggreni. 2022. Efektivitas Penerbitan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Diakses pada 27 November 2023 dalam [https://www.pajakku.com/read/62bebe20a9ea8709cb18a9d0/Efektivitas-Penerbitan-UU-Harmonisasi-Peraturan-Perpajakan-\(UU-HPP\)--](https://www.pajakku.com/read/62bebe20a9ea8709cb18a9d0/Efektivitas-Penerbitan-UU-Harmonisasi-Peraturan-Perpajakan-(UU-HPP)--) pada 5 November 2023.
- Antara. 2023. APBN Efektif Jadi “Shock Absorber”. Diakses dalam <https://koran-jakarta.com/apbn-efektif-jadi-shock->

[absorber?page=all#:~:text=Suahasil%20menjelaskan%20sebagai%20shock%20absorber,%22%20ujarnya%2C%20beberapa%20waktu%20lalu](#) pada 15 Agustus 2023.

- Anwar, R., Syariah, P. E., Sultan, I., Gorontalo, A., & Mohamad, R. 2022. Kuatkah APBN 2023 Menghadapi Guncangan Resesi Global ?
- Aqwaanaserdaulay, D. :, & Si, M. 2023. Diktat Ekonomi Makro.
- Arianty F. 2022. Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadilan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/jabt.v5i1.1034>
- Artha R, Anindita S, & Iskandar M. 2023. Hilirisasi Industri Indonesia dan Dampaknya Pada Investasi dan Kinerja Ekspor.
- Badan Kebijakan Fiskal. 2022. Tinjauan Ekonomi, Keuangan, & Fiskal.
- Badan Kebijakan Fiskal. 2023. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Kementerian Keuangan.
- Badan Pusat Statistik. 2023. Perekonomian Global dan Mitra Dagang Utama.
- Bakrie, C. R., Delanova, M. O., & Mochamad Yani, Y. 2022. Pengaruh Perang Rusia Dan Ukraina Terhadap Perekonomian Negara Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Caraka Prabu*, 6(1), 65–86. <https://doi.org/10.36859/jcp.v6i1.1019>
- Bank Indonesia. 2023. Moneter. Diakses dalam <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/default.aspx#transmisi> pada 12 November 2023
- Chen, J. 2023. Teori Sisi Penawaran: Definisi dan Perbandingan dengan Sisi Permintaan. Diakses dalam <https://www.investopedia.com/terms/s/supply-sidetheory.asp> pada 20 September 2023
- Cifuentes-Faura, J. 2022. Economic consequences of the Russia-Ukraine war: a brief overview. *España e Economía*, 23. <https://doi.org/10.4000/espacoeconomia.21807>
- CNN Indonesia. 2023. Pengangguran RI Tembus 8,42 Juta Orang di 2022. Diakses dalam [https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230219133919-92-914985/pengangguran-ri-tembus-842-juta-orang-di-2022#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20\(TPT\)%20per,terdapat%20sekitar%206%20orang%20penganggur](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230219133919-92-914985/pengangguran-ri-tembus-842-juta-orang-di-2022#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20(TPT)%20per,terdapat%20sekitar%206%20orang%20penganggur) pada 10 Juni 2023
- CORE 2022. Inflasi Indonesia di Atas 4% Masih Aman. Diakses pada 7 Juni 2023 dalam <https://mediaindonesia.com/ekonomi/503546/core-inflasi-indonesia-di-atas-4-masih-aman>
- Dano, D. 2022. Analisis Dampak Konflik Rusia–Ukraina Terhadap Harga Bahan Bakar Minyak Indonesia. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2(3), 261–269. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v2i3.1494>
- Dianne, L. 2023. Implikasi Perang Ukraina-Rusia Pada Keamanan Pangan Dunia. Kementerian Perindustrian. Diakses dalam <https://agro.kemenperin.go.id/artikel/6498-implikasi-perang-ukraina-rusia-pada-keamanan-pangan-dunia> pada 24 November 2023
- Djamba, Y. K., & Neuman, W. L. 2002. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. In *Teaching Sociology* (Vol. 30, Issue 3). <https://doi.org/10.2307/3211488>

- Eko, S., Waluyo, Y., Huda, K., Efendi, M. J., Sholeh, R., Budiyanoto, F., & Ridha, M. 2023. Studi Tentang Dampak Resesi Ekonomi Dan Krisis Global Tahun 2023 Terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional Di Indonesia *Study On The Impact Of The Economic Recession And Global Crisis In 2023 On National Economic Resilience In Indonesia* (Vol. 7, Issue 1).
- Gian, C. 2021. Sri Mulyani ‘Ogah’ Terlana Commodity Boom. Diakses dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210520125301-4-246995/sri-mulyani-ogah-terlena-commodity-boom-ini-alasannya> pada 12 November 2023
- Gouw, W. 2022. Mengupas Kebijakan Moneter Ketat. CNBC Indonesia. Diakses dalam <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20221231135619-14-401724/mengupas-kebijakan-moneter-ketat> pada 12 November 2023
- Haryono, E. 2022. Survei Konsumen (SK). Bank Indonesia.
- Investing 2023. IHK Amerika Serikat. Diakses pada 7 Juni 2023 dalam <https://id.investing.com/economic-calendar/cpi-733> pada 20 November 2023
- Kamalina, A. 2022. Memahami Resesi Global, Ini Sebab Akibatnya. Diakses dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230112/620/1617426/memahami-resesi-global-ini-sebab-akibatnya> pada 5 Juni 2023
- Kemenko Perekonomian. 2022. KUR Baru, Memperluas Akses Pembiayaan Bagi UMKM. Diakses dalam <https://kur.ekon.go.id/kur-baru-memperluas-akses-pembiayaan-bagi-umkm> pada 27 November 2023 pada 24 November 2023
- Kementerian Keuangan. 2022. Menkeu: APBN 2022 Bekerja Keras, Subsidi dan Kompensasi Energi Meningkatkan Lebih dari Tiga Kali Lipat. Diakses dalam <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-APBN-2022-Bekerja-Keras> pada 15 September 2023
- Kominfo. 2021. Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja, Ciptakan Era Baru Berusaha untuk Perluasan Lapangan Kerja. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Diakses pada 6 Desember 2023 dalam [https://www.kominfo.go.id/content/detail/32840/peraturan-pelaksanaan-uu-cipta-kerja-ciptakan-era-baru-berusaha-untuk-perluasan-lapangan-kerja/0/berita#:~:text=UU%20Cipta%20Kerja%20juga%20mengatur,\(PHK\)%2C%20serta%20pengupahan.](https://www.kominfo.go.id/content/detail/32840/peraturan-pelaksanaan-uu-cipta-kerja-ciptakan-era-baru-berusaha-untuk-perluasan-lapangan-kerja/0/berita#:~:text=UU%20Cipta%20Kerja%20juga%20mengatur,(PHK)%2C%20serta%20pengupahan.)
- Kose, M. A., Sugawara, N., & Terrones, M. E. 2020. Global Recessions. <http://www.worldbank.org/prwp>.
- Kuncoro, H. 2021. Ekonomi Moneter: Studi Kasus Indonesia. Bumi Aksara. ISBN 9786024447441.
- Lathifa, D. 2023. Berlaku 2022, Pahami Poin Penting dalam UU HPP Terbaru ini. Diakses dalam <https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/poin-penting-uu-hpp> pada 6 Desember 2023
- Latumaerissa, J. 2020. Kamus Istilah Populer: Ekonomi, Moneter, Keuangan, Perbankan. Indomedia Pustaka
- Limanseto, H. 2021. Tahun 2022 Sebagai Periode Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Diakses dalam <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3529/tahun-2022-sebagai-periode-keberlanjutan-pemulihan-ekonomi-dan-reformasi-struktural> pada 6 Desember

2023

- Mai Chandra & Amalia Fitri. 2015. Teori Makro. UNINDRA PRESS.
- Maura 2023. Pengertian Kebijakan Fiskal, Jenis, Instrumen, dan Contoh Nyata. Diakses dalam <https://www.detik.com/bali/berita/d-6568728/pengertian-kebijakan-fiskal-jenis-instrumen-dan-contoh-nyata> pada 4 Desember 2023
- Michael, W. 2008. Macroeconomic Theory.
- Moegiarso, S. 2023. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 Capai 5,31%, Tertinggi Sejak 2014. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Diakses dalam <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4904/pertumbuhan-ekonomi-tahun-2022-capai-531-tertinggi-sejak-2014#:~:text=Secara%20full%20year%2C%20pertumbuhan%20ekonomi,level%205%25%20seperti%20sebelum%20pandemi>. Pada 15 September 2023.
- Muchtolifa. 2019. Jurnal Mochtholifa. Jurnal Manajemen Jaya Negara, 11.
- Mustikowati Rita. 2010. Modul Ajar Teori Ekonomi Makro.
- Nasrudin, A. 2022. Kebijakan Sisi Penawaran: Konsep, Instrumen, Kelemahan, dan Keunggulan. Diakses dalam <https://cerdasco.com/kebijakan-sisi-penawaran/#:~:text=Kebijakan%20sisi%20penawaran%20berguna%20untuk,me%20lalui%20perbaikan%20pendidikan%20dan%20pelatihan> pada 24 November 2023.
- Nazara, S. 2023. Ketahanan Ekonomi Indonesia Cukup Kuat, Wamenkeu: Didukung Fundamental Domestik yang Kuat. Diakses dalam <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Ketahanan-Ekonomi-Indonesia-Cukup-Kuat> pada 18 September 2023.
- OCBC 2021. Kebijakan Moneter: Pengertian, Tujuan, Jenis, & Instrumennya. Diakses dalam <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/27/kebijakan-moneter-adalah> pada 20 November 2023
- Prasetyia, F. (n.d.). Rekonstruksi Sistem Fiskal Nasional Dalam Bingkai Konstitusi. *Journal of indonesian applied economics*.
- Putri, C. 2022. Sebentar Lagi Resesi di Amerika & Eropa, Begini Proyeksinya! Diakses dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221218074415-17-397818/sebentar-lagi-resesi-di-amerika-eropa-begini-proyeksinya> pada 10 Juni 2023.
- Rachman, A. 2023. Harga BBM Naik di 2022, Subsidi Energi Masih Bengkak Rp551 T. Diakses dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230103143152-4-402425/harga-bbm-naik-di-2022-subsidi-energi-masih-bengkak-rp551-t#:~:text=Subsidi%20tersebut%20setara%20dengan%2017,yakni%20Rp%20502%2C4%20triliun> pada 18 September 2023.
- Rachman. 2022. Skema Bunga KUR Murah Bakal Diubah, 3% Khusus Super Mikro. CNBC. Diakses pada 27 November 2023 dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221128191115-4-391919/skema-bunga-kur-murah-bakal-diubah-3-khusus-super-mikro>.
- Rasyidin, M., Saleh, M., Muttaqim, H., Nova, & Khairani, C. 2022. Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi di Indonesia. *Journal of Business and*

- Economics Research (JBE), Vol 3, No(2716–4128), 225–231.  
<https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1761>
- Romer, D. 1996. *Advanced Macroeconomics*. The McGraw-Hill Companies. ISBN 0-07-053667-8.
- Sandu Siyoto dan Sodik, A. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. February.
- Santosa, A. B. 2017. Analisis Inflasi di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call Papers UNISBANK Ke-3 (SENDI\_U 3) 2017, 445–452.
- Sudirman, W. 2017. Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori & Empirikal. Kencana
- Sugiatni, E. 2016. Seputar Ekonomi Makro. 4(1), 1–23.
- Suhendra. 2022. Breaking: Inggris di Jurang Resesi, Ekonomi Turun Minus 0,2%. Diakses dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221111142959-4-387115/breaking-inggris-di-jurang-resesi-ekonomi-turun-minus-02> pada 10 Juni 2023
- Sukirno, Sadono. 2017. Pengantar bisnis. Prenada Media.
- Supriyatna. 2022. Sri Mulyani: Tahun Ini Indonesia Menikmati Commodity Boom. Diakses dalam <https://www.suara.com/bisnis/2022/06/15/095600/sri-mulyani-tahun-ini-indonesia-menikmati-commodity-boom> pada 27 September 2023.
- Taufiqurrahman. 2022. Hukum Administrasi Negara di Indonesia. Malang: Literasi Nusantara.
- Tommy. 2022. Tarif Pajak yang Naik di Tahun 2022. Diakses dalam <https://www.pajakku.com/read/61dbdaf41c72eb1eee0cbc5b/Tarif-Pajak-yang-Naik-Di-Tahun-2022> pada 5 November 2023.
- Verianty, W. 2023. Apa yang Dimaksud dengan Redistribusi Pendapatan? Pahami Tujuan dan Bentuknya. Diakses pada 6 Desember 2023 dalam <https://www.liputan6.com/hot/read/5316880/apa-yang-dimaksud-dengan-redistribusi-pendapatan-pahami-tujuan-dan-bentuknya?page=3>
- WarjiyoP., Damayanti, D., Budi, D., Deputi, W., Doni, G., Joewono, P., Gubernur, D., & Budiman, A. S. 2022. Tinjauan Kebijakan Moneter Desember 2022.